

LAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
MASYARAKAT KOTA BINJAI TAHUN 2023

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai menyusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2023 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Binjai. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2021-2026 maupun Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai Tahun 2023.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Sekretaris Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun skala nilai peringkat kinerja sasaran, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja, atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun analisis capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Sasaran/Indikator Kinerja Utama
Dinas P3AM Kota Binjai Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	2.	3.	4.	5.
1.	1.1 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	1.1.1. Indeks Pembangunan Gender 1.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender 1.1.3. Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD 1.1.4. Updating Data Terpilah Gender dan Anak 1.1.5. Persentase OPD yang menyusun anggaran berbasis Gender 1.1.6. Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	90,76 70 5 orang 100% 40 OPD 100%	90,77* 70,65* 5 orang 100% 40 OPD 100%
2.	2.1 Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	2.1.1 Persentase perempuan Korban kekerasan yang Dilayani sesuai standar 2.1.2 Persentase anak korban kekerasan yang Dilayani sesuai standar	95% 100%	100% 100%
3.	3.1 Terwujudnya Kota Layak anak	3.1.1 Indeks Kota Layak Anak 3.1.2 Persentase Forum Anak di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota 3.1.3 Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD,MI, SMP, MTs) sesuai standar	500 100% 80	502,74 100% 73
4.	4.1 Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan Masyarakat	4.1.1 Jumlah LPM yang ter bina 4.1.2 Jumlah PKK Aktif 4.1.3 Jumlah Posyandu Aktif	43 43 43	43 43 43

*) Data Tahun 2022 Sumber : BPS.

1. Analisis Sasaran Strategi 1: Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Pembangunan

Capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kesetaraan dan keadilan Gender dalam Pembangunan” adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 100%.

- a. Target Nilai Indikator kinerja Indeks Pembangunan Gender Kota Binjai adalah 90,76 dan terealisasi 90,77(Data BPS Tahun 2023), sehingga capaian kerjanya adalah 100%. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Komponen penghitungan IPG adalah Angka harapan hidup, harapan pendidikan, dan indeks distribusi pendapatan Variabel untuk menyusun indikator ini diperoleh juga dari Sakernas, SUPAS dan Sensus Penduduk
- b. Target Nilai Indeks Pembangunan Gender Kota Binjai adalah 70 dan terealisasi 70,65 (Data BPS Tahun 2023) sehingga capaian kerjanya adalah 100,9%. IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Untuk mengukur Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ini melalui tiga dimensi, yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan.
- c. Target Nilai Indikator Proporsi Kursi yang diduduki perempuan di DPRD adalah sebanyak 5 orang dan terealisasi 5 orang, sehingga capaian kerjanya adalah 100%.
- d. Target Nilai Indikator Updating Data Terpilah Gender dan Anak adalah 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kerjanya adalah 100%.

- e. Target Nilai Indikator Persentase OPD yang menyusun anggaran berbasis Gender adalah 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kerjanya adalah 100%. Hal ini dapat dilihat dari 40 OPD yang ada di Kota Binjai semuanya telah menyusun anggaran berbasis gender.
- f. Target Nilai Indikator Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif adalah 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kerjanya adalah 100%.

Secara umum capaian indikator kinerja sasaran diatas sudah sangat baik dibuktikan dari sudah 40 OPD yang menyusun anggaran responsive gender.

2. Analisis Sasaran Strategi 2: Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar

Capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 102,5%.

- a. Target Persentase perempuan Korban kekerasan yang dilayani sesuai standar adalah 95% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kerjanya adalah 105%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah korban yang melapor secara keseluruhan sudah mendapat layanan pendampingan.
- b. Target Persentase anak korban kekerasan yang dilayani sesuai standar adalah 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kerjanya adalah 100%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah korban kekerasan anak yang melapor secara keseluruhan telah mendapat layanan penanganan kasus.

Pada Tahun 2023 jumlah kasus korban kekerasan perempuan dan anak ada sebanyak 39 orang dengan rincian 4 orang kasus perempuan dan 35 kasus anak. Dari 39 kasus tersebut sudah dilaksanakan layanan pendampingan bagi korban baik dari segi psikologis, advokasi dan pemeriksaan visum korban.

3. Analisis Sasaran Strategi 3: Terwujudnya Kota Layak Anak

Capaian indikator kinerja sasaran “Terwujudnya Kota Layak Anak” adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 97,25%.

- a. Target Indeks Kota Layak Anak adalah 500 dan terealisasi 502,74, sehingga capaian kerjanya adalah 100,5%. Untuk pengukuran

Indikator KLA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama seluruh pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, menetapkan 31 (tiga puluh satu) „Indikator Pemenuhan Hak Anak“ yang sekaligus juga merupakan „Indikator KLA“. Ketigapuluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerahnya.

- b. Target Persentase Forum Anak di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota adalah 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaian kerjanya adalah 100%.
- c. Target Indikator Kinerja Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) sesuai standar adalah 80 dan terealisasi 73, sehingga capaian kerjanya adalah 91,25%.

Untuk Tahun 2023 Kota Binjai mendapat predikat Kota Layak Anak tingkat Pratama. Predikat tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya pada tahun 2022 meraih predikat Kota Layak Anak Tingkat Madya. Adapun penurunan tersebut diakibatkan adanya beberapa indikator penilaian yang belum terpenuhi secara maksimal.

4. Analisis Sasaran Strategi 4: Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan Masyarakat

Capaian indikator kinerja sasaran “Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan Masyarakat” adalah sangat tinggi, yaitu mencapai 100%.

- a. Target Indikator Kinerja Jumlah LPM yang terbina adalah 43 LPM dan terealisasi sebanyak 43 LPM, sehingga capaian kerjanya adalah 100%;
- b. Target Indikator Kinerja Jumlah PKK Aktif adalah 43 PKK dan terealisasi sebanyak 43 PKK, sehingga capaian kerjanya adalah 100%;
- c. Target Indikator Kinerja Jumlah Posyandu Aktif adalah 241 Posyandu dan terealisasi sebanyak 241 Posyandu, sehingga capaian kerjanya adalah 100%.

Pada Tahun 2023 kegiatan LPM, PKK dan Posyandu tetap terlaksana dengan baik mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota. Para Kader Posyandu juga telah melaksanakan pelayanan posyandu di masing-masing kelurahan dengan baik.

3.2.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

Tabel 3.5
Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian
			2022	2023	
1.	2.	3.	4.		
1.	1.2 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	1.1.7. Indeks Pembangunan Gender 1.1.8. Indeks Pemberdayaan Gender 1.1.9. Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD 1.1.10. Updating Data Terpilah Gender dan Anak 1.1.11. Persentase OPD yang menyusun anggaran berbasis Gender 1.1.12. Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	90,76 70 5 orang 100% 40 OPD 100%	90,77 71 5 orang 100% 40 OPD 100%	Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi
2.	2.1 Meningkatnya perlindungan dan penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	2.1.1 Persentase perempuan Korban kekerasan yang Dilayani sesuai standar 2.1.2 Persentase anak korban kekerasan yang Dilayani sesuai standar	95% 100%	100% 100%	Sangat Tinggi Sangat Tinggi
3.	3.1 Terwujudnya Kota Layak anak	3.1.1 Indeks Kota Layak Anak	500	725	Sangat Tinggi

		3.1.2	Persentase Forum Anak di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota	100%	78%	Tinggi	
		3.1.3	Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD,MI, SMP, MTs) sesuai standar	80	75	Tinggi	
4.	4.1	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan Masyarakat	4.1.1	Jumlah LPM yang terbina	43	43	Sangat Tinggi
			4.1.2	Jumlah PKK Aktif	43	43	Sangat Tinggi
			4.1.3	Jumlah Posyandu Aktif	43	43	Sangat Tinggi

**3.2.3 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai**

Tabel 3.6

Realisasi dan Target Renstra Dinas P3AM

No	Sasaran	Indikator Kinerja/Sasaran	Realisasi 2023	Target Kinerja Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	1.3 Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	1.1.13. Indeks Pembangunan Gender	90,77	90,76	90,76	90,76	90,77	90,77
		1.1.14. Indeks Pemberdayaan Gender	69,77	69,77	70	70	70	71
		1.1.15. Proporsi kursi yang diduduki Perempuan di DPRD	5	5	5	5	5	5
		1.1.16. Updating Data Terpilah Gender dan Anak		100%	100%	100%	100%	100%
		1.1.17. Persentase OPD yang menyusun anggaran berbasis Gender	40	40	40	40	40	40
		1.1.18. Persentase Kelembagaan PUG yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2.1 Meningkatnya perlindungan dan	2.1.1 Persentase perempuan Korban kekerasan		94%	95%	96%	97%	98%

	penanganan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai standar	yang Dilayani sesuai standar 2.1.2 Persentase anak korban kekerasan yang Dilayani sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.1	Terwujudnya Kota Layak anak	3.1.1 Indeks Kota Layak Anak		500	500	500	500	500
		3.1.2 Persentase Forum Anak di Tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota		100%	100%	100%	100%	100%
		3.1.3 Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD,MI, SMP, MTs) sesuai standar		75	80	85	85	85
		3.1.1 Indeks Kota Layak Anak						
4.1	Optimalnya pembinaan fungsi kelembagaan pemberdayaan Masyarakat	4.1.1 Jumlah LPM yang terbina	43	43	43	43	43	43
		4.1.2 Jumlah PKK Aktif	43	43	43	43	43	43
		4.1.3 Jumlah Posyandu Aktif	241	241	241	241	241	241

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Kota Lain

Berdasarkan Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk Tahun 2023 Kota Binjai mendapat Predikat Kota Layak Anak Tingkat Pratama begitu juga dengan Kota Sibolga. Sedangkan Kota Medan dan Kabupaten Serdang Bedagai mendapat predikat Madya.

Tabel 3.7

Peringkat Kota Layak Anak Wilayah Sumatera Utara

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Predikat
1	Medan	Madya
2	Binjai	Pratama
3	Serdang Bedagai	Madya
4.	Sibolga	Pratama

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

3.2.5.1 Kendala / Hambatan dalam Pencapaian Target.

Secara umum, capaian beberapa kegiatan penguatan untuk mendukung sasaran strategis meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan pada tahun 2023 belum optimal dan mengalami beberapa hambatan, diantaranya :

- a. Belum adanya regulasi ataupun Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
- b. Masih minimnya fasilitas sarana dan prasarana untuk layanan penjangkauan dan pendampingan korban;
- c. Belum terpenuhinya indikator penilaian untuk kota layak anak;
- d. Terbatasnya anggaran untuk peningkatan sumber daya Lembaga Kemasyarakatan;
- e. Fasilitas Sarana dan Prasaran Posyandu yang kurang memadai.

a. Solusi / Harapan dalam Pencapaian Target.

Solusi / Harapan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai agar tercapai target Sasaran Strategis, perlu dilakukan beberapa kebijakan yang akan diterapkan, sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;
2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak kepolisian dan Rumah Sakit Daerah dalam penanganan kasus korban kekerasan;
3. Melaksanakan penguatan Tim Gugus Kota Layak Anak untuk percepatan dan memenuhi indikator Kota Layak Anak;
4. Memfasilitasi Sarana dan prasarana posyandu agar pelayanan kesehatan ibu, bayi dan anak dapat terpenuhi.